

Pendidikan Sebagai Agen Reformasi Sosial: Analisis Filosofis Pemikiran John Dewey

*Ratna Fauziatul Istiqomah¹, Muhammad Muchlish Huda², Navilatur Rosyidah³,
Muhammad Hasan Al-Ilyas⁴, Salam Edi Riyanto⁵*

¹⁻⁵Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, Indonesia

E-mail: sejahteras651@gmail.com¹, muhmuchlishhuda@uinponorogo.ac.id²,
navilatur0506@gmail.com³, ilyashasan050206@gmail.com⁴, edisalam51@gmail.com⁵

Received: May 14, 2026| Revised: May 18, 2026| Accepted: May 31, 2026

Abstrak

Penelitian ini menelaah peran pendidikan sebagai agen reformasi sosial dengan menjadikan gagasan John Dewey tentang *learning by doing* sebagai kerangka analisis utama. Dewey menegaskan bahwa pengetahuan tidak cukup ditransfer secara teoritis, melainkan harus dikonstruksi melalui keterlibatan aktif peserta didik dalam pengalaman nyata. Sekolah dipandang sebagai miniatur masyarakat yang membentuk kebiasaan, nilai, dan kesadaran kritis melalui aktivitas langsung. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji artikel jurnal, buku filsafat pendidikan, kebijakan nasional seperti Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, serta dokumen kurikulum yang menekankan pembelajaran aktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa relevansi gagasan Dewey tampak dalam praktik pendidikan Indonesia yang berupaya menggeser paradigma dari guru sebagai pusat menuju siswa sebagai subjek utama. Model pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, observasi lapangan, dan simulasi digital menjadi contoh penerapan *learning by doing* yang memperkuat keterhubungan antara teori dan praktik, sekaligus mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Pendidikan juga berfungsi sebagai wahana transmisi budaya, menjaga nilai lokal sekaligus membuka ruang akulturasi dengan unsur global. Dalam konteks modernisasi dan era digital, integrasi literasi teknologi dengan pendidikan karakter menjadi penting agar generasi muda mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, pemerataan akses pendidikan inklusif menjadi syarat penting untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi sosial berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui kebijakan inklusif, pendidik yang adaptif, serta kolaborasi komunitas. Dengan demikian, pendidikan benar-benar berfungsi sebagai motor reformasi sosial yang adil, berkelanjutan, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini.

Kata Kunci : *John Dewey, Learning by Doing, Pendidikan Indonesia, Pengalaman Belajar, Reformasi Sosial.*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) international license.

1. PENDAHULUAN

John Dewey, seorang tokoh pendidikan terkemuka dari Amerika, mengemukakan konsep pendidikan partisipatif yang bertujuan untuk memberikan peran lebih besar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi secara langsung dengan realitas di lingkungan mereka, sehingga mereka dapat menghubungkan materi yang dipelajari di kelas dengan situasi nyata yang ada di sekitar mereka (Dedi Arianto, 2020). John Dewey memandang pendidikan sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Baginya, pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu atau pelatihan keterampilan teknis, tetapi merupakan proses sosial yang melibatkan interaksi, partisipasi, dan pembelajaran dari pengalaman bersama dalam komunitas. Artinya, pendidikan berlangsung dalam konteks sosial yang nyata, di mana individu berkembang melalui hubungan dengan orang lain, lingkungan sekitar, serta nilai-nilai sosial yang hidup di Masyarakat (Norma Eva Joanne, 2025).

Pendidikan merupakan proses seumur hidup yang berlangsung di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagai usaha sadar, ia bertujuan mengembangkan potensi individu melalui pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai moral lebih dari sekadar meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan, pendidikan memberdayakan seseorang untuk berkontribusi positif bagi masyarakat, menumbuhkan kesadaran akan isu global, serta berperan dalam mengurangi ketimpangan sosial. Dengan kata lain, pendidikan menjadi fondasi utama bagi kemajuan pribadi dan kolektif (A. Khuzainol Mubarak, 2024).

Berbagai studi yang dilakukan di Indonesia mengukuhkan peran krusial pendidikan sebagai motor penggerak perubahan sosial. Dalam kajiannya, Joanne dan Situmorang menyoroti relevansi pemikiran pragmatis John Dewey, yang memandang pendidikan sebagai wahana transformasi masyarakat yang bertumpu pada pengalaman langsung (Norma Eva Joanne, 2025). Menurut Ridwan Idris, urgensi untuk membicarakan pendidikan sebagai motor perubahan masyarakat kian mendesak. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi pendidikan di Indonesia yang dinilainya masih kurang menjadi prioritas perhatian, baik dari sisi kebijakan maupun implementasi di lapangan. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mampu mendorong transformasi sosial dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara luas (Idris, 2013).

Sebagaimana ditegaskan Dedi Arianto, pendidikan menurut John Dewey memiliki tujuan untuk membangkitkan sikap hidup demokratis dan mengembangkannya melalui pengalaman anak. Pendidikan dipahami sebagai proses sosial di mana sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang tidak hanya mentransmisikan nilai, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan peserta didik agar mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pendidikan berperan penting dalam menyiapkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab sebagai warga (Deliana et al., 2024).

Namun demikian, penelitian-penelitian yang telah ada cenderung terfokus pada aspek pedagogis dan kurikulum, seperti kajian mengenai pendidikan partisipatif maupun kreativitas siswa. Sementara itu, analisis filosofis yang memosisikan sekolah sebagai agen reformasi sosial masih jarang dilakukan. Lebih lanjut, integrasi pemikiran Dewey dengan konteks sosio kultural Indonesia

belum banyak dikaji secara sistematis. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya penelitian yang mampu menguraikan secara mendalam relevansi filosofis Dewey dalam menempatkan sekolah sebagai motor reformasi sosial.

Berdasarkan gap tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan pemikiran filosofis John Dewey mengenai sekolah sebagai agen reformasi sosial, menganalisis relevansi pemikiran tersebut dalam konteks pendidikan Indonesia masa kini, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi sekolah dalam mengemban peran reformasi sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menelaah pemikiran John Dewey, khususnya konsep *learning by doing*, serta relevansinya dalam pendidikan Indonesia. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan menelaah artikel jurnal, buku filsafat pendidikan klasik dan kontemporer, kebijakan pendidikan nasional seperti Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, serta dokumen kurikulum dan laporan penelitian terkait pembelajaran aktif. Analisis dilakukan dengan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tema utama, menafsirkan makna filosofis, dan merumuskan implikasi praktis. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber, sehingga kajian ini menampilkan analisis menyeluruh mengenai keterkaitan pemikiran Dewey dengan praktik pendidikan di Indonesia masa kini (Dhorva Endriana Fatimatuz Zuhriyah, Muhammad Fariz Ash shiddiq Ibrahim Mamesah, Nandika Rizki Fitriani Ramadhani, 2025).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Filosofis John Dewey

Marcelo Caruso, dalam tulisannya, menegaskan bahwa hubungan antara pendidikan dan masyarakat bersifat timbal balik dan kompleks. Pendidikan bukan sekadar cerminan dari kondisi sosial yang ada. Ia secara aktif turut membentuk, dibentuk oleh, dan bahkan terkadang melawan arus perubahan di masyarakat. Caruso memberikan bukti konkret bahwa dinamika di tingkat ruang kelas (*mikro*) tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat (*makro*). Lebih jauh lagi, ia memaparkan bagaimana tatanan pendidikan dapat menjadi fondasi sekaligus hambatan dalam mewujudkan perubahan (Caruso, 2022).

Ketika masyarakat berubah melalui modernisasi ekonomi dan perkembangan kota, peran anak pun ikut ditata ulang. Oleh karena itu, reformasi sosial yang dijalankan melalui jalur pendidikan pada hakikatnya berarti membentuk ulang pemahaman kita tentang hakikat "anak", serta peran dan kontribusi mereka bagi Masyarakat (Caruso, 2022). Reformasi pendidikan tidak dapat dipusatkan semata-mata pada ruang kelas, melainkan perlu mempertimbangkan ekologi kelembagaan secara menyeluruh. Dengan kata lain, upaya memperbaiki kualitas pendidikan berarti membenahi seluruh sistem yang ada, bukan sekadar menyempurnakan interaksi antara guru dan murid (Caruso, 2022).

Bagi John Dewey, hakikat pendidikan adalah pembentukan kebiasaan. Konsekuensinya, pendidik harus melakukan apa pun yang memungkinkan untuk menumbuhkan kebiasaan baik pada diri peserta didik. Lebih lanjut, pendidikan yang bertujuan membangun kewarganegaraan demokratis menuntut adanya jenis pengalaman pembiasaan tertentu yang secara khusus dirancang untuk tujuan tersebut (Heilbronn, 2017). Dewey memaparkan filosofinya tentang pengalaman edukatif yang berkualitas, teori pembelajarannya didasari oleh keyakinan bahwa peserta didik

bukanlah batu tulis kosong yang pasif menunggu diisi dengan fakta dan pengetahuan. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa siswa belajar paling baik ketika mereka secara aktif membangun pemahaman berangkat dari pengalaman masa lalu dan lingkungan eksternal untuk menghubungkannya dengan pengalaman saat ini, sekaligus mempersiapkan diri bagi pertumbuhan berkelanjutan di masa depan (Landorf & Wadley, 2022). Pandangan Caruso tidak hanya memperkuat, tetapi juga menghidupkan kembali gagasan Dewey bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah proses sosial yang aktif dan dinamis.

Menanggapi kebangkitan *fasisme* (penolakan terhadap demokrasi) pada tahun 1939, John Dewey secara eksplisit mengemukakan argumen ini dalam karyanya yang berjudul *Freedom and Culture*. Dalam buku tersebut, ia menekankan pentingnya memahami bagaimana unsur-unsur kebudayaan saling berinteraksi, serta bagaimana unsur-unsur pembawaan manusia turut berinteraksi satu sama lain seluruhnya dalam kondisi yang telah ditentukan oleh interaksi mereka dengan lingkungan yang ada. Budaya merupakan gagasan yang kuat dalam menerangi tindakan masa kini dan masa depan, serta mengarahkan kita pada tujuan rekonstruktif yang digagas Dewey. Ia dapat dipahami sebagai istilah yang berguna untuk merangkum hubungan kompleks antara sumber daya material dan simbolik yang dengannya kebiasaan dikembangkan dan dipelihara pada proses pembentukan kebiasaan itu sendiri, khususnya kebiasaan yang dibentuk oleh sekolah, interaksi di lingkungan sekolah dengan orang lain, kurikulum, serta keberadaan yang dikonstruksi dalam kehidupan bersama (*associated living*) (Heilbronn, 2017).

Sekolah dapat dipahami sebagai mikrokosmos dari realitas sosial yang dikemukakan Dewey sebelumnya. Baginya, pendidikan harus berangkat dari pemahaman tentang saling ketergantungan antara masyarakat dan anak-anak. Artinya, kaum muda tidak hanya mengalami dan bereksperimen dalam lingkungan sosial, tetapi juga menerima budaya dan pengalaman yang dimediasi oleh orang dewasa (Aziz, 1119). Kualitas utama yang memungkinkan perkembangan anak adalah fleksibilitas dan plastisitas yang mereka miliki, dengan daya tanggap sosialnya, anak-anak belajar dari pengalaman serta mengembangkan disposisi dan kebiasaan, penyesuaian aktif terhadap lingkungan ini kemudian berkembang menjadi apa yang disebut Dewey sebagai "kebiasaan penggunaan aktif lingkungan kita" (*habits of active use of our surroundings*). Kebiasaan ini dapat bermuara pada kebaikan atau keburukan maka dari itu, pendidikan, baik formal maupun informal, hendaknya menjadi proses yang mengembangkan kebiasaan baik.

Dari sudut pandang antropologis, budaya tempat anak tumbuh merupakan lingkungan berkelanjutan yang membentuk kebiasaan dan disposisi mereka. Sementara dari sudut pandang pengalaman, kebiasaan dan disposisi yang mapan akan terus berkembang. Apa yang dialami anak perlu dipahami sebagai keberadaan mereka dalam semacam interaktivitas umpan balik yang bersifat biologis dan sosial yang oleh Dewey disebut sebagai "kontinuitas pengalaman" (*continuity of experience*), yaitu sesuatu yang "mendasar dalam konstitusi pengalaman" (*fundamental in the constitution of experience*) (Heilbronn, 2017).

John Dewey memperkenalkan konsep *learning by doing* yang menegaskan bahwa pengalaman nyata merupakan inti dari pembelajaran yang bermakna. Pengetahuan tidak cukup hanya dipahami secara teoritis, melainkan harus dikonstruksi melalui keterlibatan langsung dalam

aktivitas yang memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam kebijakan perubahan kurikulum dari 2013 hingga Merdeka menekankan pergeseran paradigma pembelajaran, dari dominasi guru menuju siswa sebagai pusat aktivitas belajar (Dhorva Endriana Fatimatuz Zuhriyah, Muhammad Fariz Ash shiddiq Ibrahim Mamesah, Nandika Rizki Fitriani Ramadhani, 2025).

Penerapan gagasan Dewey tampak jelas dalam praktik pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, observasi lapangan, maupun simulasi digital. Model-model tersebut tidak hanya mendorong keterlibatan aktif siswa, tetapi juga memperkuat hubungan konseptual dan aplikatif tidak hanya memperkuat pemahaman, tetapi juga melatih kecakapan berpikir kritis dan pemecahan masalah (Dhorva Endriana Fatimatuz Zuhriyah, Muhammad Fariz Ash shiddiq Ibrahim Mamesah, Nandika Rizki Fitriani Ramadhani, 2025). Dengan demikian, *learning by doing* dapat dipandang sebagai kerangka analisis yang relevan untuk memahami arah pendidikan Indonesia dalam membentuk generasi yang kreatif, reflektif, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21.

Pendidik memiliki tanggung jawab untuk senantiasa mengevaluasi arah pengalaman belajar yang berlangsung. Mereka perlu mempertimbangkan ke mana pengalaman tersebut bergerak apakah mengarah pada pertumbuhan atau tidak guna memoderasi, mengarahkan, atau bahkan menyertakan pengalaman itu ke dalam proses pembelajaran. Pendidik tidak hanya dituntut untuk secara sadar membentuk arah pengalaman, tetapi juga harus jeli membaca lingkungan fisik dan sosial, serta mengenali sikap-sikap apa yang kondusif bagi tumbuhnya pengalaman yang bermakna. Semua itu perlu digunakan sebagai landasan untuk menyediakan pengalaman-pengalaman belajar yang berharga bagi peserta didik (Landorf & Wadley, 2022).

Pendidikan sebagai agen reformasi sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang membentuk sikap, nilai, dan kapasitas individu dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui proses pendidikan, peserta didik didorong untuk mengembangkan kesadaran sosial serta kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungannya. Dengan demikian, pendidikan membantu masyarakat merencanakan dan mengelola perubahan sosial secara lebih terarah dan berkelanjutan. Secara konseptual, pendidikan juga menumbuhkan kesadaran kritis yang memungkinkan individu mengenali ketidakadilan sosial serta mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam tindakan kolektif demi terciptanya reformasi sosial. Dalam hal ini, pendidikan memiliki fungsi liberative yang mengubah peserta didik menjadi agen perubahan yang aktif, bukan sekadar penerima pasif informasi (Lulu Farihati, 2025).

Selain itu, pendidikan juga berperan sebagai wahana transmisi budaya dalam masyarakat. Melalui proses enkulturasi, pendidikan membantu menanamkan nilai-nilai budaya, norma sosial, dan tradisi yang menjadi identitas suatu masyarakat kepada generasi muda. Proses ini penting agar peserta didik memahami akar budaya serta memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Namun di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, pendidikan juga berfungsi memfasilitasi proses akulturasi budaya, yaitu penerimaan unsur-unsur baru yang relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar yang telah ada. Dengan demikian, pendidikan memiliki peran ganda, yakni menjaga keberlangsungan nilai budaya lokal sekaligus

membuka ruang bagi masyarakat untuk beradaptasi secara bijak terhadap berbagai perubahan sosial yang terjadi secara global (Eko Satria Wahyu Utama, Asep Marfu, Anis Fauzi, 2025).

Dalam konteks modernisasi dan perkembangan teknologi digital, pendidikan juga perlu menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Integrasi literasi digital dan pendidikan karakter menjadi hal yang penting agar peserta didik mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Selain itu, kurikulum pendidikan perlu dirancang secara holistik dengan menggabungkan kompetensi abad ke-21, etika digital, serta nilai-nilai kearifan lokal. Melalui pendekatan tersebut, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cakap secara teknologi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan moral dalam menghadapi perubahan masyarakat modern (Sriartha et al., 2024).

Agar konsep pendidikan sebagai agen reformasi sosial dapat terwujud secara optimal, diperlukan dukungan dari berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas pendidik serta manajemen sekolah yang adaptif terhadap perubahan zaman, kebijakan pendidikan yang mendorong pemerataan akses, termasuk penyediaan infrastruktur digital yang memadai. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, komunitas, dan para pemangku kebijakan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat dampak sosial dari berbagai program pendidikan yang dilaksanakan.

Namun demikian, apabila pendidikan hanya difokuskan pada pencapaian output akademik atau penguasaan teknologi tanpa diimbangi dengan penanaman nilai dan prinsip pemerataan, maka proses modernisasi justru berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif. Dampak tersebut dapat berupa meningkatnya perilaku menyimpang, melemahnya nilai-nilai budaya lokal, serta semakin lebarnya kesenjangan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, arah kebijakan pendidikan perlu menekankan pentingnya pendidikan karakter, inklusivitas, serta relevansi dengan konteks sosial masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan dapat benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak reformasi sosial yang adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Relevansi dalam Konteks Pendidikan di Indonesia

KBBI dan Sukmadinata sama-sama menekankan makna relevansi sebagai keterhubungan. Dalam pandangan Sukmadinata, relevansi internal berarti adanya konsistensi antar komponen kurikulum, sementara relevansi eksternal menunjukkan kesesuaian kurikulum dengan tuntutan serta perkembangan masyarakat (Nana Syaodih Sukmadinata, 2007).

Pandangan Burhan Nurgiyantoro menegaskan bahwa relevansi tercermin dalam kesatuan antara hasil pendidikan dan kebutuhan masyarakat. Sistem pendidikan dapat dikatakan sesuai apabila menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika kemampuan lulusan dari suatu lembaga pendidikan tidak cukup berguna dalam memenuhi kebutuhan kehidupan, maka sistem pendidikan tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Burhan Nurgiyantoro, 1998).

Relevansi pendidikan, sebagaimana dijelaskan Nurgiyantoro, mencakup tiga dimensi peninjauan yang menegaskan hubungan erat antara hasil pendidikan dan kebutuhan masyarakat.

- A. Hubungan pendidikan dan masyarakat menuntut agar lembaga pendidikan menyediakan bekal kemampuan bagi peserta didik sehingga mereka mampu beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan setempat.
- B. Relevansi pendidikan dengan dunia kerja menekankan bahwa lembaga pendidikan harus menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, diperlukan kerja sama antara institusi pendidikan dan pihak pengguna lulusan.
- C. Relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman menuntut agar sistem pendidikan tidak hanya menyiapkan peserta didik menghadapi kebutuhan masa kini, tetapi juga membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengantisipasi perubahan tuntutan kehidupan di masa depan (Burhan Nurgiyantoro, 1998).

Pendidikan dan masyarakat memiliki hubungan yang saling memengaruhi secara erat. Kondisi sosial membentuk arah pendidikan, sementara pendidikan mampu mengubah struktur masyarakat. Relasi ini menjadi dasar penting dalam merancang reformasi sosial yang berkelanjutan (Alan J. Daly, Nienke M. Moolenaar, Jose M. Bolivar, Peggy Burke, 2010). Peran pendidikan dalam lanskap sosial-ekonomi terlihat dari kebijakan yang tidak hanya menyentuh kurikulum, tetapi juga struktur sosial secara menyeluruh. Reformasi pendidikan berfungsi sebagai katalis perubahan, termasuk dalam mobilitas sosial dan stratifikasi masyarakat (Angervall, 2023).

Sebagai modal sosial, pendidikan menyediakan keterampilan, nilai, dan pengalaman yang memperkuat interaksi sosial (Fox et al., 2023). Sekolah berfungsi bukan sekadar ruang belajar, melainkan simpul jaringan sosial yang mendorong kolaborasi antar komunitas dan pemerataan sumber daya (Chris Brown, Ruth Luzmore, Richard O'Donovan, Grace Ji, Susmita Patnaik, 2023). Ekuitas pendidikan menjadi jembatan menuju reformasi sosial. Ketidakadilan akses menuntut respons kolektif dari negara dan institusi (Molla & Gale, 2023). Namun, hambatan struktural masih melemahkan keadilan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan komunitas marginal (Ainscow & Viola, 2024). Dari perspektif sosiologi, pendidikan dipandang sebagai sistem sosial yang menjalankan fungsi tertentu bagi masyarakat. Kritik terhadap pendekatan fungsional menekankan perlunya sosiologi pendidikan yang lebih inklusif dan global, agar tidak hanya mempertahankan status quo (Lischka-Schmidt, 2023).

Reformasi pendidikan yang inklusif dan partisipatif menjadi syarat utama keberhasilan. Kepemimpinan sekolah harus mendorong iklim yang memperkuat modal sosial, bukan sekadar modal finansial (Christopher Chapman, 2022). Pendidikan kejuruan maupun umum dituntut untuk aktif menantang ketimpangan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil (Alan J. Daly, Nienke M. Moolenaar, Jose M. Bolivar, Peggy Burke, 2010). Pendidikan bukan hanya sarana transfer ilmu, tetapi motor perubahan sosial yang menyentuh aspek ekonomi, budaya, dan keadilan. Ia berfungsi sebagai modal sosial, jembatan ekuitas, serta arena dialektika masyarakat, sehingga reformasi pendidikan harus inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial (Kirstin Kerr, 2024).

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, mutu pendidikan nasional yang terkait dengan pendidikan Islam masih belum mencapai harapan yang diinginkan. Salah satu isue mendasar dalam dinamika pendidikan di Indonesia adalah kesulitan dalam menghubungkan transfer

pengetahuan dengan korelasi pengabdian kepada Tuhan. Hal ini berasal dari dasar pemikiran yang membentuk hubungan antar manusia dengan sesama manusia (*hablu min an-nas*) dan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablu minallah*) (Sugiarti, I., & Muzammil, 2023).

Tantangan Pendidikan sebagai Agen Reformasi Sosial di Indonesia

Meskipun pendidikan memiliki peran penting sebagai agen reformasi sosial, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama dalam aspek fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, serta akses terhadap teknologi digital. Ketimpangan tersebut menyebabkan proses pendidikan belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan sosial dan kesempatan belajar yang setara bagi seluruh peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan sebagai sarana perubahan sosial masih menghadapi hambatan dalam mewujudkan keadilan sosial di berbagai daerah.

Selain itu, penerapan pendidikan inklusif di Indonesia juga masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Penelitian Farida Kurniawati menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar pedesaan masih terkendala keterbatasan kompetensi guru, kurangnya pelatihan, serta minimnya penggunaan strategi pembelajaran kolaboratif dan diferensiasi dalam kelas inklusif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa reformasi pendidikan tidak cukup hanya melalui kebijakan formal, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, dukungan pelatihan yang berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai agar seluruh peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan secara optimal (Kurniawati, 2021).

Tantangan lainnya muncul dalam proses reformasi pendidikan di era modern. Penelitian mengenai perspektif guru terhadap reformasi pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru dalam memahami dan menerapkan perubahan kebijakan pendidikan. Perbedaan kondisi antara sekolah di wilayah urban dan rural juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi reformasi pendidikan. Sekolah di daerah perkotaan cenderung memiliki akses sumber daya yang lebih baik dibandingkan sekolah di daerah terpencil, sehingga kualitas pelaksanaan reformasi pendidikan menjadi tidak merata (Baharuddin & Burhan, 2025).

Dalam konteks perkembangan teknologi digital, pendidikan di Indonesia juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital (*digital divide*). Tidak semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap internet, perangkat teknologi, maupun kemampuan literasi digital. Kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan dan sosial apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pendidikan yang inklusif dan pemerataan infrastruktur digital. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga menuntut kesiapan guru dan peserta didik agar teknologi tidak hanya digunakan sebagai sarana administratif, tetapi juga mampu mendukung pembelajaran yang kritis, partisipatif, dan kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat modern (Ncube & Tawanda, 2025).

Di sisi lain, pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas juga masih menghadapi tantangan diskriminasi, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya tenaga pendidik khusus. Penelitian Mawardi dkk. menunjukkan bahwa marginalisasi struktural masih terjadi dalam sistem pendidikan inklusif di Indonesia, seperti kurikulum yang belum aksesibel, asesmen yang tidak

adaptif, serta kurangnya dukungan institusional bagi peserta didik disabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih perlu melakukan berbagai pembenahan agar prinsip kesetaraan dan keadilan pendidikan benar-benar dapat diwujudkan secara menyeluruh (Mawardi et al., 2025).

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, reformasi sosial melalui pendidikan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan kesadaran sosial, pemerataan akses, penguatan nilai demokrasi, serta penghargaan terhadap keberagaman dan inklusivitas sebagaimana yang ditekankan dalam pemikiran John Dewey. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi sarana transformasi sosial yang mampu menciptakan masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berorientasi pada kemanusiaan.

4. KESIMPULAN

Pendidikan memiliki peran strategis sebagai motor reformasi sosial. Ia tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kebiasaan, nilai, dan kesadaran kritis sehingga peserta didik mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat demokratis. Dengan merujuk pada pemikiran John Dewey, sekolah dipandang sebagai miniatur masyarakat yang menyediakan pengalaman langsung, interaksi sosial, serta ruang pembentukan karakter.

Dalam konteks Indonesia, relevansi pendidikan tampak dari penerapan prinsip *learning by doing* dalam kebijakan Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka. Praktik pembelajaran berbasis proyek, eksperimen, observasi lapangan, maupun simulasi digital menunjukkan bagaimana gagasan Dewey diterapkan untuk membentuk generasi kreatif, reflektif, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Transformasi sosial yang berkelanjutan menuntut sinergi antara pendidik yang adaptif, manajemen sekolah yang responsif, kebijakan inklusif, serta kolaborasi dengan keluarga dan komunitas. Dengan pendekatan yang menekankan pengalaman langsung, pemerataan akses, dan penguatan modal sosial, pendidikan dapat berfungsi sebagai agen reformasi sosial yang adil, berkelanjutan, dan relevan bagi kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini.

REFERENSI

- A. Khuzainol Mubarak. (2024). Pendidikan dan Perkembangan Masyarakat Perspektif John Dewey. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 11(3). <https://doi.org/10.31571/sosial.v11i3.8265>
- Ainscow, M., & Viola, M. (2024). Developing inclusive and equitable education systems : some lessons from Uruguay lessons from Uruguay. *International Journal of Inclusive Education ISSN:*, 28(14). <https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2279556>
- Alan J. Daly, Nienke M. Moolenaar, Jose M. Bolivar, Peggy Burke. (2010). *Relationships in Reform : The Role of Teachers' Social Networks*. 48(3), 359-391. <https://doi.org/10.1108/09578231011041062>
- Angervall. (2023). Towards a Sociology of Educational "Ideal": Powerful Knowledge, Knowledge of the Powerful, and Beyond. *British Journal of Sociology of Education*, 45(1), 60-78. Taylor & Francis. *British Journal of Sociology of Education*, Taylor & Francis, 45(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01425692.2023.2270166>
- Aziz, S. A. (1119). *Al-Tarbiyah Wa Turuq Al-Tadris*. Dar al-Ma'arif.

- Baharuddin, & Burhan. (2025). Urban and rural teacher perspectives on Indonesian educational reform: challenges and policy implications. *Cogent Education*, 12(1), 2497142. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2497142>
- Burhan Nurgiyantoro. (1998). *Teori Pengkajian Fiksi*. BPFY-Yogyakarta.
- Caruso, M. (2022). The Slow Dichotomization of Elementary Classroom Roles. "Grammar of schooling" and the Estrangement of Classrooms in Western Europe (1830-1900). *Paedagogica Historica*, 58(2), 196–214. <https://doi.org/10.1080/00309230.2020.1822887>
- Chris Brown, Ruth Luzmore, Richard O'Donovan, Grace Ji, Susmita Patnaik. (2023). How Educational Leaders Can Maximise the Social Capital Benefits of Inter-School Networks: Findings From a Systematic Review. *International Journal of Educational Management*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/IJEM-09-2023-0447>
- Christopher Chapman, M. Ainscow. (2022). *Educational Equity Pathways to Success*. Taylor & Francis.
- Dedi Arianto. (2020). Relevansi Pemikiran John Dewey Pada Pendidikan di Indoensia. *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (Tarbiyatul Misbah)*, 13(2).
- Deliana, Heni Susanti, Marta Desi Putri, & Nizwardi Jalirnis. (2024). Paradigma Karakteristik Kurikulum Merdeka dalam Pembentukan Kreativitas Siswa. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 3253–3260.
- Dhorva Endriana Fatimatuz Zuhriyah, Muhammad Fariz Ash shiddiq Ibrahim Mamesah, Nandika Rizki Fitriani Ramadhani. (2025). Analisis Filsafat Pendidikan John Dewey Melalui Konsep Learning by Doing dalam Pendidikan Modern. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/https://e-journal.epistemeacademia.org/index.php/IJMS/article/view/24>
- Eko Satria Wahyu Utama, Asep Marfu, Anis Fauzi, S. (2025). Pendidikan dan Perubahan Sosial Budaya. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 723–732. <https://doi.org/https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5835>
- Fox, S., Taylor, C., Evans, C., & Rees, G. (2023). The Positional Effects of Education on Social Capital in the UK. *International Journal of Sociology*, 53(4), 261–282. <https://doi.org/10.1080/00207659.2023.2227457>
- Heilbronn, R. (2017). Dewey and Culture: Responding to "Extreme Views." In *Journal of Philosophy of Education* (Vol. 51, Number 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-9752.12217>
- Idris, R. (2013). Pendidikan Sebagai Agen Perubahan Menuju Masyarakat Indonesia Seutuhnya. *Jurnal Tarbiyah Dan Keguruan UIN Alauddin Makassar*, 16(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lp.2013v16n1a5>
- Kirstin Kerr, M. A. (2024). The Development of a Methodology For Enhancing Equity Within Systems. *International Journal of Research & Method in Education*, 47. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/1743727X.2023.2231862>
- Kurniawati, F. (2021). Exploring teachers' inclusive education strategies in rural Indonesian primary schools. *Educational Research*, 63(2), 198–211. <https://doi.org/10.1080/00131881.2021.1915698>
- Landorf, H., & Wadley, C. (2022). The Importance of John Dewey's Philosophy For Global Learning Theory and Practice. *Social Studies Research and Practice*, 17(1), 6–18. <https://doi.org/10.1108/ssrp-09-2021-0027>
- Lischka-Schmidt, R. (2023). Sosiologi Pendidikan Talcott Parsons: Rasionalitas Kognitif dan Fungsionalisme Normatif. *British Journal of Sociology of Education*, 44(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01425692.2023.2238907>

-
- Lulu Farihati, T. N. (2025). Pendidika dan Perubahan Sosial di Tengah Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36512>
- Mawardi, R. A., Budirahayu, T., Ariadi, S., & Saud, M. (2025). Structural Marginalization of Students With Disabilities in Indonesia's Inclusive Education System: A Sociological Perspective. *Child & Youth Services*, 1–25. <https://doi.org/10.1080/0145935X.2025.2590438>
- Molla, T., & Gale, T. (2023). Educational Disadvantage and Policy: Expanding the Spaces of Assessment. *Journal of Education Policy*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/02680939.2023.2218322>
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2007). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Ncube, C. N., & Tawanda, T. (2025). Critical digital pedagogy for contemporary transformative practices in the Global South: a literature review. *Cogent Education*, 12(1), 2523133. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2523133>
- Norma Eva Joanne, A. S. (2025). Kajian Pemikiran Pragmatis John Dewey tentang Pendidikan sebagai Sarana Transformasi Sosial. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.54592/jct.v5i1.278>
- Sriartha, I. P., Mudana, W., Pageh, I. M., Tari, I. D. A. E. P. D., Ursula, P. A., & Erawati, N. K. (2024). Perubahan Sosial Dan Pendidikan Karakter Di Era Digital. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora*, 8(2), 2633–2639. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2>.
- Sugiarti, I., & Muzammil, S. (2023). Relevansi Perspektif Pendidikan Al-Ghazali Terhadap Paradigma Pendidikan Islam di Indonesia. *Journal of Humanities Issues*, 1(2). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21\(1\).14705](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2024.vol21(1).14705)